



ANALISIS KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

Bonilisa Rantebalik

Program Studi Akuntansi, Politeknik Negeri Ujung Pandang
rantebalikbonilisa@gmail.com

Tawakkal

Program Studi Akuntansi, Politeknik Negeri Ujung Pandang
rantebalikbonilisa@gmail.com

Anna Sutrisna S

Program Studi Akuntansi, Politeknik Negeri Ujung Pandang
rantebalikbonilisa@gmail.com

Abstract

This research was conducted to analyze the implementation performance Regional Revenues and Expenditures Budget of Tana Toraja sLocal Government during the 2010-2014 period with three performace approach consist of Revenues, Expenditures, and Financing. Analyze method used in this research is descriptive with qualitative approach and quantitative approach. The results showed that the performance of Regional Revenues and Expenditures Budget Tana TorajaLocal Government during the 2010-2014 period generally is quite good. The Budget performance based on revenues approach is good with positive revenues growth and local real revenues during the 2010-2014 period could realized more than the expectation which is covered on budget. The Budget performance based on expenditures approach, there are some programs which is not realized maximal, besides that the allocation of budget utilization focused on government daily activity. Based on Fincing sector, showed that positive performance of SILPA growth so it means that appropriately budget presentation by local government.

Keyword: Regional revenues and expenditures budget, regional revenues and expenditures, SILPA.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Tana Toraja selama periode 2010-2014 dengan tiga pendekatan performansi yang terdiri dari Pendapatan, Pengeluaran, dan Pembiayaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana TorajaPemerintah Lokal selama periode 2010-2014 umumnya cukup baik. Kinerja anggaran berdasarkan pendekatan penerimaan baik dengan pertumbuhan pendapatan positif dan pendapatan asli daerah selama periode 2010-2014 dapat menyadari lebih dari harapan yang tercakup dalam anggaran. Kinerja anggaran berdasarkan pendekatan pengeluaran, ada beberapa program yang tidak terealisasi maksimal, disamping itu alokasi penggunaan anggaran terfokus pada kegiatan harian pemerintah. Berdasarkan sektor Fincing, menunjukkan bahwa kinerja pertumbuhan SILPA positif sehingga ini berarti presentasi anggaran yang tepat oleh pemerintah daerah.

Kata Kunci: Pendapatan daerah dan anggaran belanja, pendapatan dan belanja daerah, SILPA.

PENDAHULUAN

UU No. 23 tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa pemerintahan dilaksanakan berdasarkan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan, maka dalam rangka desentralisasi dibentuk dan disusun pemerintah provinsi dan pemerintah kota sebagai daerah otonomi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dapat memberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang lebih luas oleh pemerintah daerah pada dasarnya perlu didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai, mengingat bahwa kondisi sumber-sumber penerimaan antar satu daerah dengan daerah lainnya sangat beragam. Ada beberapa daerah dengan sumber daya yang dimiliki mampu menyelenggarakan otonomi daerah, namun tidak tertutup kemungkinan ada beberapa daerah menghadapi kesulitan dalam menyelenggarakan tugas desentralisasi, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Kreativitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali sumber keuangan sangat tergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintahan daerah itu sendiri. Di satu sisi, mobilisasi sumber daya keuangan untuk membiayai pelbagai aktivitas daerah ini dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam penerapan otonomi daerah.

Rahayu,*dkk* (2007) menyatakan bahwa penerapan *performance budgeting* dalam proses penyusunan anggaran belum berjalan sebagaimana yang diinginkan. Perubahan kebijakan hanya diikuti oleh daerah pada tingkat perubahan teknis dan format, namun perubahan paradigma belum banyak terjadi. Dominasi pembangunan fisik dan alokasi anggaran yang lebih banyak dinikmati oleh kalangan birokrasi, menunjukkan bahwa fokus dan alokasi dana pembangunan masih harus terus diperbaiki. Selain itu, Bryant dan White dalam Nogi (2007: 93) mengemukakan bahwa kebanyakan kritikus mengemukakan bahwa rencana-rencana lima tahun pemerintah sudah menjadi mode, formalitas, dan bahkan ritualitas, dan serta sedikit atau malah tidak ada akibatnya sama sekali terhadap keputusan sehari-hari.

Jika dilihat dari struktur pendapatan daerah, pemerintah Kab. Tana Toraja tergolong memiliki tingkat ketergantungan fiskal yang cukup tinggi pada Pemerintah Pusat. Selain itu dari segi Belanja, sebagian besar anggaran pemerintah daerah tidak terealisasi secara maksimal. Hal ini mengindikasikan dua kemungkinan, disatu sisi pemerintah daerah tidak mampu mengoptimalkan pelaksanaan anggaran terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, atau disisi lain pemerintah daerah justru berhasil melakukan efisiensi belanja untuk menekan pengeluaran sejumlah program pengembangan di daerah. Lebih lanjut, berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008, bagian utara Kabupaten Tana Toraja dimekarkan menjadi Kabupaten Toraja Utara, dan konsekuensi logis dari hasil pemekaran tersebut tentunya terdapat terdapat sejumlah potensi aset yang menjanjikan dan telah terdistribusi menjadi wilayah Kabupaten Toraja Utara.

Selain jumlah anggaran pendapatan dan jumlah anggaran belanja, dapat dilihat pula surplus/defisit laporan realisasi APBD Kab. Tana Toraja. Selama periode lima tahun anggaran hanya tahun 2010 pemerintah Kab. Tana Toraja menganggarkan terjadi surplus selebihnya tahun 2011-2014 dianggarkan terjadi nilai defisit. Sedangkan pada realisasinya, tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 mengalami surplus, menunjukkan nilai defisit hanya pada tahun 2012 dan kembali menjadi nilai surplus pada dua tahun berikutnya yaitu pada tahun 2013-2014. Hal tersebut mengindikasikan, pemerintah relatif kurang cermat dalam menyusun perencanaan anggaran.

Penelitian ini memberikan gambaran kinerja pelaksanaan APBD Pemerintah Kab. Tana Toraja selama tahun 2010-2014. Dipilihnya periode lima tahun terakhir karena penulis tertarik

untuk mengukur kinerja dari objek penelitian secara khusus setelah terjadi pemekaran wilayah Tana Toraja pada tahun 2008 serta diperlukan beberapa tahun perbandingan dalam penelitian ini untuk mengambil kesimpulan terkait dengan pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Tana Toraja selama kurun waktu lima tahun terakhir.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan kinerja pengelolaan keuangan daerah atau analisis anggaran secara umum telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Marizka (2009) dan Maulana (2014) telah melakukan penelitian ditempat yang berbeda yaitu di Kota Medan dan Kabupaten Sinjai dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian yang akan dilakukan ini akan mempertimbangkan kedua pendekatan dari penelitian sebelumnya.

TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Menurut Mamesah dalam Halim (2012: 25), keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Menurut Halim (2012:28), "Ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari keuangann daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan yang dikelola langsung dalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada pengimplementasian perundang-undangan yang berkenan dengan pengelolaan keuangan/anggaran daerah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian direvisi menjadi Permendagri No. 16 Tahun 2013. Sebagai tindak lanjut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan terakhir telah direvisi dengan Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelola keuangan daerah sebagaimana dinyatakan dalam Permendagri No. 16 Tahun 2013 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah". Pengelolaan daerah dimulai dengan perencanaan/penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

APBD merupakan instrument kebijakan yaitu sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Proses penganggaran yang telah direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan tertib serta disiplin akan mencapai sasaran yang lebih optimal.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Mahmudi (2010:1), menjelaskan bahwa negara-negara maju yang memiliki praktik akuntansi yang kompleks, kebutuhan terhadap publikasi informasi keuangan merupakan suatu keniscayaan. Bahkan tanpa harus dipaksa pun, institusi bisnis maupun publik secara suka rela bersedia menyajikan laporan keuangan dan mengungkapkan informasi penting yang terkait dengan organisasi kepada pemangku kepentingannya (*stakeholder*). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan suatu informasi atau laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah, yang secara spesifik terdiri atas neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Pengukuran Kinerja

Menurut Mahsun (2013:25), “Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis suatu organisasi”. Kinerja dapat diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Robertson, 2002) dalam Mahsun (2013:25).

Akuntabilitas Kinerja

Menurut Mahsun (2012:169) Akuntabilitas berhubungan terutama dengan mekanisme supervisi, pelaporan, dan pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi dalam sebuah rantai komando formal. Pada era desentralisasi dan otonomi daerah, para manajer publik diharapkan bisa melakukan transformasi dari sebuah peran ketaatan pasif menjadi seorang yang berpartisipasi aktif dalam penyusunan standar akuntabilitas yang sesuai dengan keinginan dan harapan publik.

Analisis Pembiayaan

Analisis Pembiayaan dilakukan untuk pola anggaran pemerintah daerah. Selain itu juga dapat digunakan untuk membaca kebijakan anggaran pemerintah daerah. Sistem penganggaran berbasis kinerja yang berlaku saat ini, kinerja anggaran tidak lagi didasarkan habis tidaknya anggaran, tetapi diukur dari tercapai tidaknya target kinerja dengan anggaran yang disediakan.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis Data

Tujuan dilakukannya tanya jawab dengan SKPD yang mengelola Pendapatan dan Belanja ialah untuk mengetahui secara lebih rinci mengenai pos-pos anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja mendukung hasil kesimpulan dari perhitungan analisis rasio keuangan untuk menilai kinerja pelaksanaan anggaran pemerintah daerah Kab. Tana Toraja. Berikut ini analisis rasio keuangan sektor publik yang dimaksud antara lain:

1. Analisis Kinerja Pendapatan

- a. Analisis Varians Pendapatan
- b. Analisis Rasio Pertumbuhan Pendapatan
- c. Analisis Rasio Derajat Desentralisasi
- d. Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
2. Analisis Kinerja Belanja
 - a. Analisis Varians (selisih) Anggaran Belanja
 - b. Analisis Pertumbuhan Belanja
 - c. Analisis Keserasian Belanja
3. Analisis Pembiayaan

Jika pada tahun anggaran tertentu tingkat belanja daerah relatif rendah atau terjadi efisiensi anggaran, maka dimungkinka diperoleh SILPA yang lebih tinggi. Tetapi sebaliknya jika belanja daerah tinggi, maka SILPA yang diperoleh akan semakin kecil, bahkan jika belanja daerah lebih besar daripada pendapatan daerah sehingga menyebabkan terjadi defisit fiskal, maka tidak ada SILPA untuk tahun anggaran bersangkutan tetapi justru dimungkinkan terjadi Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA) (Mahmudi, 2010:174).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Kinerja Pendapatan

Dengan menggunakan data APBD dan realisasi APBD Pemerintah Daerah Kab. Tana Toraja tahun anggaran 2010-2014, dilakukan analisis pendapatan dengan cara analisis:

a. Analisis Varians Pendapatan

Analisis varians anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi pendapatan dengan yang dianggarkan. Pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan. Sebaliknya apabila realisasi pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Dari analisis varians, secara umum kinerja pendapatan Kab. Tana Toraja dari tahun 2010-2014 dapat dikatakan cukup baik dengan rata-rata realisasi sebesar 96,82%.

Tabel 1. Realisasi Pendapatan Kabupaten Tana Toraja Tahun anggaran 2010-2014

| Uraian | Realisasi (%) | | | | | Rata-rata realisasi (%) |
|---------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| <i>Pendapatan Daerah</i> | 93,61 | 96,42 | 95,56 | 99,12 | 99,39 | 97 |
| PAD | 77,29 | 71,99 | 106,85 | 106,32 | 122,69 | 97 |
| Pendapatan Transfer | 94,78 | 96,95 | 97,69 | 98,88 | 98,69 | 97 |
| Lain2 Pendapatan yang Sah | 85,05 | 103,81 | 74,70 | 92,50 | 52,36 | 82 |

Sumber: DPPKAD Kab. Tana Toraja (Data Diolah 2015)

Rendahnya jumlah penerimaan PAD pada tahun 2010 dan tahun 2011 beberapa diantaranya disebabkan oleh realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang belum maksimal. Secara teknis hal-hal yang menjadi penghambat antara lain frekuensi penagihan yang belum maksimal, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi

daerah masih rendah dan tidak tepat waktu, serta mekanisme pengawasan dan sistem pengendalian dalam pengelolaan pendapatan daerah yang belum maksimal. Namun sejumlah kendala ini berhasil diminimalisir pada tiga tahun anggaran berikutnya, sehingga jumlah realisasi PAD berhasil melampaui target anggaran 100%. Secara keseluruhan, komposisi PAD terhadap total pendapatan sangat kecil jika dibandingkan dengan komponen pendapatan lainnya seperti Pendapatan Transfer serta Lain-lain pendapatan yang sah khusus untuk tahun 2011 dan 2012.

b. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Hasil perhitungan pertumbuhan pendapatan pemerintah daerah Kab. Tana Toraja tahun 2010-2014 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Pertumbuhan Pendapatan

| Thn | Realisasi Pendapatan (dalam jutaan Rp) | Selisih Pertumbuhan (dalam jutaan Rp) | Tingkat Pertum- buan (%) |
|------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| 2009 | 412.223,80 | . | |
| 2010 | 465.030,47 | 52.806,67 | 12,81% |
| 2011 | 588.681,44 | 123.650,96 | 26,59% |
| 2012 | 575.808,36 | (12.873,08) | -2,19% |
| 2013 | 659.885,05 | 84.076,69 | 14,60% |
| 2014 | 757.374,94 | 97.489,34 | 14,77% |
| Rata-rata Pertumbuhan | | | 13,44% |

Sumber: DPPKAD Kab. Tana Toraja (Data Diolah 2015)

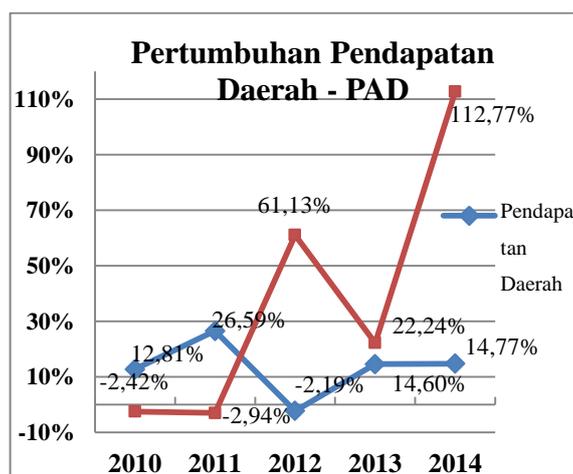
Berikut, dapat pula dilihat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah selama periode anggaran 2010-2014 pada tabel berikut:

Tabel 3. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

| Uraian | Realisasi Pendapatan (dalam jutaan Rp) | | | | | Average Growth (%) |
|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Pajak Daerah | 1.811,30 | 2.356,02 | 3.736,53 | 3.882,20 | 6.516,32 | 23,73 |
| <i>Growth</i> | - | 30,07% | 58,60 % | 3,90% | 67,85% | |
| Retribusi Daerah | 13.486,19 | 11.572,40 | 22.338,06 | 27.834,71 | 59.960,99 | 44,06 |
| <i>Growth</i> | 1,46% | -14,19% | 93,03 % | 24,61 % | 115,42 % | |
| Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 819,34 | 1.043,04 | 1.038,70 | 1.675,38 | 2.198,85 | 27,65 |
| <i>Growth</i> | 18,81% | 27,30% | -0,42% | 61,30 % | 31,24% | |
| Lain-lain PAD yang Sah | 4.166,78 | 4.715,38 | 4.607,38 | 5.384,36 | 13.829,93 | 39,48 |
| <i>Growth</i> | 12,79% | 13,17% | -2,29% | 16,86 % | 156,85 % | |
| Total PAD | 20.283,62 | 19.686,83 | 31.720,68 | 38.776,67 | 82.506,08 | 38,16 |
| <i>Growth</i> | -2,42% | -2,94% | 61,13 % | 22,24 % | 112,77 % | |

Sumber: DPPKAD Kab. Tana Toraja (Data Diolah 2015)

Berdasarkan perhitungan pertumbuhan pendapatan pada Tabel 2 kinerja pendapatan Kab. Tana Toraja tahun 2010-2014 tergolong cukup baik, hal ini ditunjukkan dari rata-rata pertumbuhan pendapatan yang bernilai positif yaitu sebesar 13,44%. Selain itu, kinerja pendapatan dapat pula dilihat dari sisi pendapatan asli daerah yang dimuat pada Tabel 3 menunjukkan bahwa kinerja Kab. Tana Tora tahun 2010-2014 tergolong baik, hal ini ditunjukkan dari rata-rata pertumbuhan PAD yang memiliki nilai positif 38,16%. Secara rinci pertumbuhan Pendapatan dan Pendapatan Asli Daerah Kab. Tana Toraja tahun 2010-2014 dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Pendapatan Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kab. Tana Toraja tahun 2010-2014

Rasio Derajat Desentralisasi

Hasil perhitungan rasio Derajat Desentralisasi pemerintah daerah Kab. Tana Toraja tahun 2010-2014 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Derajat Desentralisasi

| Tahun | Pendapatan Asli Daerah (PAD) (dalam jutaan Rp) | Total Pendapatan Daerah (dalam jutaan Rp) | Rasio | Tingkat Desentralisasi |
|-----------|--|---|--------|------------------------|
| 2010 | 20.283,6 | 465.030,5 | 4,36% | Sangat Kurang |
| 2011 | 19.686,8 | 588.681,4 | 3,34% | Sangat Kurang |
| 2012 | 31.720,7 | 575.808,4 | 5,51% | Sangat Kurang |
| 2013 | 38.776,7 | 659.885,1 | 5,88% | Sangat Kurang |
| 2014 | 82.506,1 | 757.374,4 | 10,89% | Kurang |
| Rata-rata | | | 4,83% | |

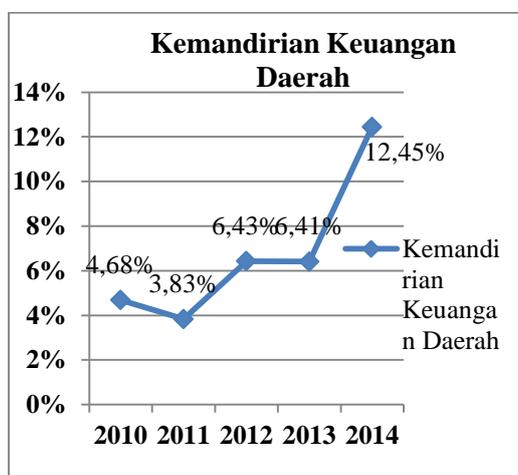
Sumber: DPPKAD Kab. Tana Toraja (Data Diolah 2015)

Berdasarkan hasil perhitungan derajat desentralisasi pada Tabel 4.8 dengan cara membandingkan PAD dengan Total Pendapatan Daerah, dapat diketahui kemampuan keuangan Kab. Tana Toraja tahun 2010-2014 ditinjau dari rata-rata tingkat desentralisasinyakni sebesar

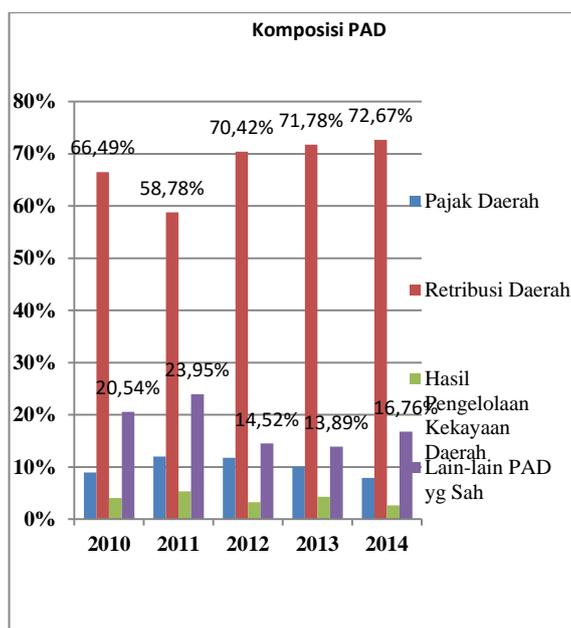
| | (Rp) | | (Rp) | | (Rp) | | (Rp) | | (Rp) | |
|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|------------|---------------|------------|
| Pajak Daerah | 1.811 | 9 | 2.356 | 12 | 3.736 | 12 | 3.882 | 10 | 6.516 | 8 |
| Retribusi Daerah | 13.486 | 66 | 11.572 | 59 | 22.338 | 70 | 27.835 | 72 | 59.961 | 73 |
| Hsl Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan | 819. | 4 | 1.043 | 5 | 1.039 | 3 | 1.675 | 4 | 2.199 | 3 |
| Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah | 4.166 | 21 | 4.715 | 24 | 4.607 | 15 | 5.384 | 14 | 13.830 | 17 |
| Total PAD | 20.283 | 100 | 19.686 | 100 | 31.721 | 100 | 38.776. | 100 | 82.506 | 100 |

Sumber: DPPKAD Kab. Tana Toraja (Data Diolah 2015)

Berikut ini grafik kemandirian keuangan daerah Kab. Tana Toraja tahun 2010-2014:



Gambar 3 Grafik Kemandirian Keuangan Daerah Kab. Tana Toraja tahun 2010-2014



Gambar 4. Grafik Komposisi PAD Kab. Tana Toraja tahun 2010-2014

Berdasarkan Gambar 4 menunjukkan bahwa penerimaan PAD terbesar selama tahun anggaran 2010-2014 berasal dari penerimaan Retribusi Daerah, selanjutnya diperoleh dari Lain-lain PAD yang sah kemudian penerimaan pajak daerah dan yang terkecil merupakan penerimaan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Analisis Kinerja Belanja

Secara umum analisis kinerja belanja terkait dengan pelaksanaan anggaran pemerintah Kab. Tana Toraja periode 2010-2014 dilakukan dengan menganalisis tingkat pencapaian realisasi anggaran belanja yang bersumber dari data APBD dan realisasi APBD Pemerintah Daerah Kab. Tana Toraja tahun anggaran 2010-2014. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana prioritas pembangunan daerah dituangkan dalam alokasi anggaran per-urusan, untuk itu-lah dilakukan analisis belanja dengan cara analisis:

a. Analisis Varians Belanja

Analisis varians anggaran belanja dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi belanja dengan yang dianggarkan. Mengacu pada pendekatan kinerja. Dari analisis varians, secara umum kinerja belanja Kab. Tana Toraja dari tahun 2010-2014 dapat dikatakan cukup baik karena jumlah belanja tidak melebihi jumlah target yang dianggarkan, yakni dengan rata-rata realisasi sebesar 89,36% dan dari keseluruhan periode anggaran tersebut hanya pada tahun 2012 total realisasi belanja daerah menunjukkan nilai persentase diatas 90% yakni sebesar 94,33%. Berikut ini tabel ringkasan realisasi belanja pemerintah daerah Kab. Tana Toraja tahun 2010-2014:

Tabel 7. Realisasi Belanja Kabupaten Tana Toraja Tahun anggaran 2010-2014

| Uraian | Realisasi | | | | | Rata-rata Realisasi (%) |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Belanja Daerah | 86% | 89% | 94% | 89% | 88% | 89% |
| Belanja Operasi | 94% | 96% | 96% | 92% | 93% | 94% |
| Belanja Modal | 56% | 77% | 90% | 80% | 79% | 77% |

Sumber: DPPKAD Kab. Tana Toraja (Data Diolah 2015)

Rendahnya jumlah realisasi belanja daerah yang persentasenya berkisar dibawah 90% secara umum disebabkan karena beberapa program memang tidak terlaksana secara maksimal, dan secara teknis hal tersebut disebabkan oleh keterlambatan petunjuk teknis dan anggaran dari pemerintah pusat sehingga mengambat pelaksanaan sejumlah kegiatan, penetapan APBD perubahan yang belum tepat waktu, pelaksanaan penunjukan dan pelelangan kegiatan terlambat dilaksanakan, tersebarnya alokasi dana ke beberapa program pembangunan sehingga mengalami kesulitan dalam pemantauan atau pengawasan kegiatan, kegiatan pembangunan yang dilakukan lebih dari satu tahun anggaran.

b. Rasio Pertumbuhan Belanja

Hasil perhitungan pertumbuhan belanja pemerintah daerah Kab. Tana Toraja tahun 2010-2014 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 8. Pertumbuhan Belanja

| Uraian | Realisasi Belanja (dalam jutaan Rp) | | | | | Growth Average (%) |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Belanja Operasi | 336.801 | 395.116 | 437.235 | 473.377 | 533.610 | 9,81 |
| <i>Growth</i> | 0,07% | 17% | 11% | 8,27% | 12,72% | |
| Belanja Modal | 68.881 | 166.152 | 153.048 | 118.010 | 188.362 | 24,49 |
| <i>Growth</i> | -48% | 141% | -8% | 22,89% | 59,62% | |
| Belanja Tidak Terduga | 521 | 117 | 808 | 206 | - | 126,30 |
| <i>Growth</i> | 143% | -77% | 590% | 76,15% | 100,00% | |
| Transfer | 7.623 | 1.086 | 1.985 | 1.043 | 12.454 | 354,64 |
| <i>Pertumbuhan</i> | 729% | -85% | 83% | 47,47% | 1094,61% | |
| Total Belanja | 413.826 | 562.471 | 593.076 | 592.637 | 734.426 | 10,69 |
| <i>Growth</i> | - | 36% | 5,44% | -0,07% | 23,93% | |

Sumber: DPPKAD Kab. Tana Toraja (Data Diolah 2015)

Secara rinci pertumbuhan Belanja Daerah Kab. Tana Toraja tahun 2010-2014 menunjukkan pada grafik berikut ini:

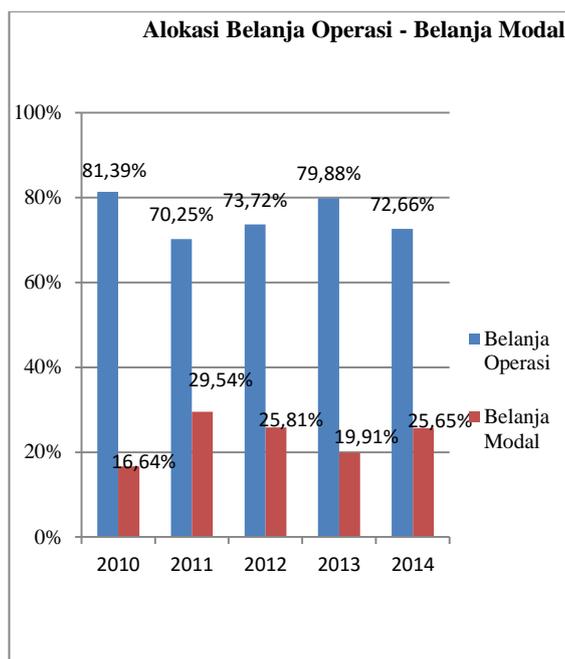
a. Rasio Keserasian Belanja

- 1) Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja dan Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

Tabel 9. Rasio Keserasian Belanja Operasi terhadap Total Belanja dan Belanja Modal terhadap Total Belanja

| Thn | Total Belanja (dalam jutaan Rp) | Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja | | Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja | |
|------------------|---------------------------------|--|-----------|--|-----------|
| | | Belanja Operasi (Rp) | Rasio (%) | Belanja Modal (Rp) | Rasio (%) |
| 2010 | 413.826 | 336.801 | 81 | 68.881 | 17 |
| 2011 | 562.471 | 395.116 | 70 | 166.152 | 30 |
| 2012 | 593.076 | 437.235 | 74 | 153.048 | 26 |
| 2013 | 592.636 | 473.377 | 80 | 118.010 | 20 |
| 2014 | 734.426 | 533.610 | 73 | 188.362 | 26 |
| Rata-rata | | | 75 | | 24 |

Sumber: DPPKAD Kab. Tana Toraja (Data Diolah 2015)



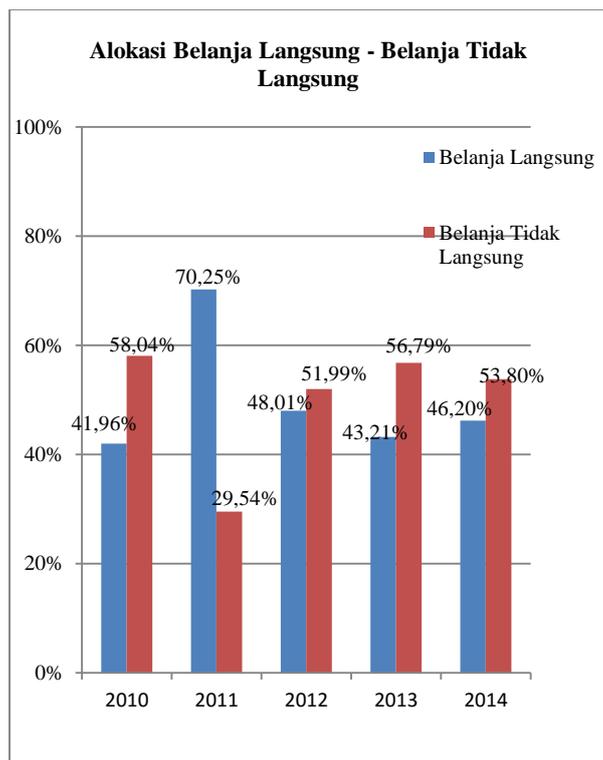
Gambar 6 . Grafik Proporsi Alokasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Kab. Tana Toraja tahun 2010-2014

2) Analisis Belanja Langsung terhadap Total Belanja dan Analisis Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja

Tabel 10. Rasio Keserasian Belanja Langsung terhadap Total Belanja dan Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja

| Tahun | Total Belanja (dalam jutaan Rp) | Rasio Belanja Langsung terhadap Total Belanja | | Rasio Belanja tidak Langsung terhadap Total Belanja | |
|------------------|---------------------------------|---|--------------|---|--------------|
| | | Belanja Langsung (dalam jutaan Rp) | Rasio (%) | Belanja Tidak Langsung dalam jutaan Rp) | Rasio (%) |
| 2010 | 413.826 | 173.643 | 42 | 240.183 | 58,04 |
| 2011 | 562.471 | 395.116 | 70,25 | 166.152 | 29,54 |
| 2012 | 593.076 | 284.765 | 48,01 | 308.310 | 51,99 |
| 2013 | 592.636 | 256.098 | 43,21 | 336.538 | 56,79 |
| 2014 | 734.426 | 339.324 | 46,20 | 395.101 | 53,80 |
| Rata-rata | | | 53,56 | | 46,36 |

Sumber: DPPKAD Kab. Tana Toraja (Data Diolah 2015)



Gambar 7. Grafik Proporsi Alokasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Kab. Tana Toraja tahun 2010-2014

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Tana Torajacenderung mengalokasikan dana lebih besar untuk kebutuhan belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan untuk pelayanan publik. Sedangkan secara normatif seharusnya belanja publik lebih besar daripada belanja operasional, minimal terjadi trend kenaikan dari tahun ke tahun. Sehingga, proporsi demikian belum dapat menjamin percepatan pemenuhan infrastruktur dasar Kabupaten Tabna Toraja oleh karena alokasi belanja tidak langsung lebih besar dari belanja langsung.

Analisis Pembiayaan

Salah satu pos yang paling penting dalam pembiayaan ini adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Makin besar SiLPA yang diperoleh dari suatu anggaran dapat dijadikan salah satu indikator kurang baiknya kualitas perencanaan anggaran. Hasil perhitungan pembiayaan pemerintah daerah Kab. Tana Toraja tahun 2010-2014 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 11. Perhitungan Pembiayaan Daerah Kab. Tana Toraja

| Tahun | Surplus/Defisit (dalam jutaan Rp) | Pembiayaan Netto (dalam jutaan Rp) | SiLPA (dalam jutaan Rp) |
|-------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 2010 | 51.204 | (34.870) | 16.334 |
| 2011 | 26.210 | 1.391 | 27.601 |
| 2012 | (3.465) | 18.735 | 15.270 |
| 2013 | 67.249 | 4.859 | 72.108 |
| 2014 | 22.949 | 68.442 | 91.371 |

Sumber: DPPKAD Kab. Tana Toraja (Data Diolah 2015)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2010-2014 kinerja pemerintah daerah Kab. Tana Toraja secara umum sudah baik, hal ini terlihat dari SiLPA yang bersaldo positif yang berarti pemerintah daerah sudah tepat dalam penyajian suatu rencana anggaran. Hanya saja dari segi penerimaan pembiayaan sebagian besar hanya terdiri atas alokasi SiLPA dari tahun sebelumnya sementara Penerimaan Piutang Daerah yang dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan tidak terealisasi secara maksimal bahkan sebagian besar persentasenya nihil.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada beberapa komponen Laporan Realisasi Anggaran Kab. Tana Toraja tahun 2010-2014 maka dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja pelaksanaan Anggaran pemerintah daerah secara umum dapat dikategorikan cukup baik. Secara spesifik dari sisi pendapatan, tergolong cukup baik karena rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah, secara khusus pada pertumbuhan PAD menunjukkan rata-rata pertumbuhan yang positif. Selain itu berdasarkan realisasi penerimaan pendapatan daerah, komponen Pendapatan Asli Daerah selama tiga tahun terakhir berhasil melampaui target penerimaan yang direncanakan sebelumnya. Sedangkan untuk derajat desentralisasi dan tingkat kemandirian, diketahui bahwa Pemerintah Kab. Tana Toraja belum mampu membiayai pengeluarannya sendiri dengan kata lain masih sangat bergantung pada pemerintah pusat.

Kinerja belanja Pemerintah Kab. Tana Toraja dapat dikatakan cukup baik, dimana berdasarkan realisasi belanja tahun 2010-2014, jumlah pengeluaran belanja pemerintah tidak melebihi target anggaran yang telah ditetapkan yakni dengan nilai realisasi rata-rata sebesar 89,36%. Capaian tersebut secara persentase menunjukkan terjadinya penyerapan anggaran yang cukup rendah, dimana terdapat kendala yang menghambat pelaksanaan beberapa program pembangunan sehingga tidak dapat terealisasi secara maksimal. Sedangkan menurut pertumbuhan belanja menunjukkan rata-rata pertumbuhan yang positif namun cenderung fluktuatif. Berdasarkan rasio keserasian belanja dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan anggaran belanja pemerintah Kabupaten Tana Toraja lebih memprioritaskan belanja daerah untuk pemenuhan aktivitas rutin pemerintah, serta belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan pelayanan publik.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2010-2014 kinerja pemerintah daerah Kab. Tana Toraja secara umum sudah baik, hal ini terlihat dari SiLPA yang bersaldo positif yang berarti pemerintah daerah sudah tepat dalam penyajian suatu rencana anggaran. Hanya saja dari segi penerimaan pembiayaan sebagian besar hanya terdiri atas alokasi SiLPA dari tahun sebelumnya sementara Penerimaan Piutang Daerah yang dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan tidak terealisasi secara maksimal.

Saran

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sama diharapkan untuk menganalisis lebih mendalam mengenai pelaksanaan APBD pada Pemerintah Daerah dengan menambahkan jumlah rasio yang dijadikan tolak ukur, agar penelitian yang dihasilkan lebih andal dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Oesi. 2013. *Jurnal Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011)*. Universitas Brawijaya. Malang.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Pertama. Erlangga. Yogyakarta
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Fidelius. 2013. *Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado*. Jurnal EMBA Vol. 1 No. Desember 2013. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Halim, Abdul dkk. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Lutfieka, Brodjonegoro dan Asanuma. 2001. *Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan Ditinjau Dari Proses Dan Pengalokasian*
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Kedua. UPP STIM YPKN. Yogyakarta.
- Mahsun, Moh., dkk. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPF.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Marizka, Addina. 2009. *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan: Skripsi*, Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Maulana, Achmad. 2014. *Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sinjai: Skripsi*, Makassar: Politeknik Negeri Ujung Pandang.
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Purba, Ris Ulina. 2012. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Di Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara Medan.
- Rahayu, Sri at. Al.. 2007. *Studi Fenomenologis Terhadap Proses Penyusunan Anggaran Daerah Bukti Empiris Dari Satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Provinsi Jambi*. *SNA X Unhas Makasar*.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2007. *Manajemen Publik*. Grasindo, Cetakan ke-2, Jakarta
- Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.
- Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

